



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN



PENGELOLAAN TKDD BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

DIREKTORAT EVALUASI DAN SISTEM INFORMASI

26 November 2020



OUTLINE

01

LATAR BELAKANG

Alur Belanja APBN ke Daerah, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

02

PEMANFAATAN TI UNTUK TKDD

Overview penggunaan aplikasi, pemanfaatan data

03

PENGEMBANGAN DAN TRANSFORMASI

Overview Data Transaksi, Framework Interkoneksi,

04

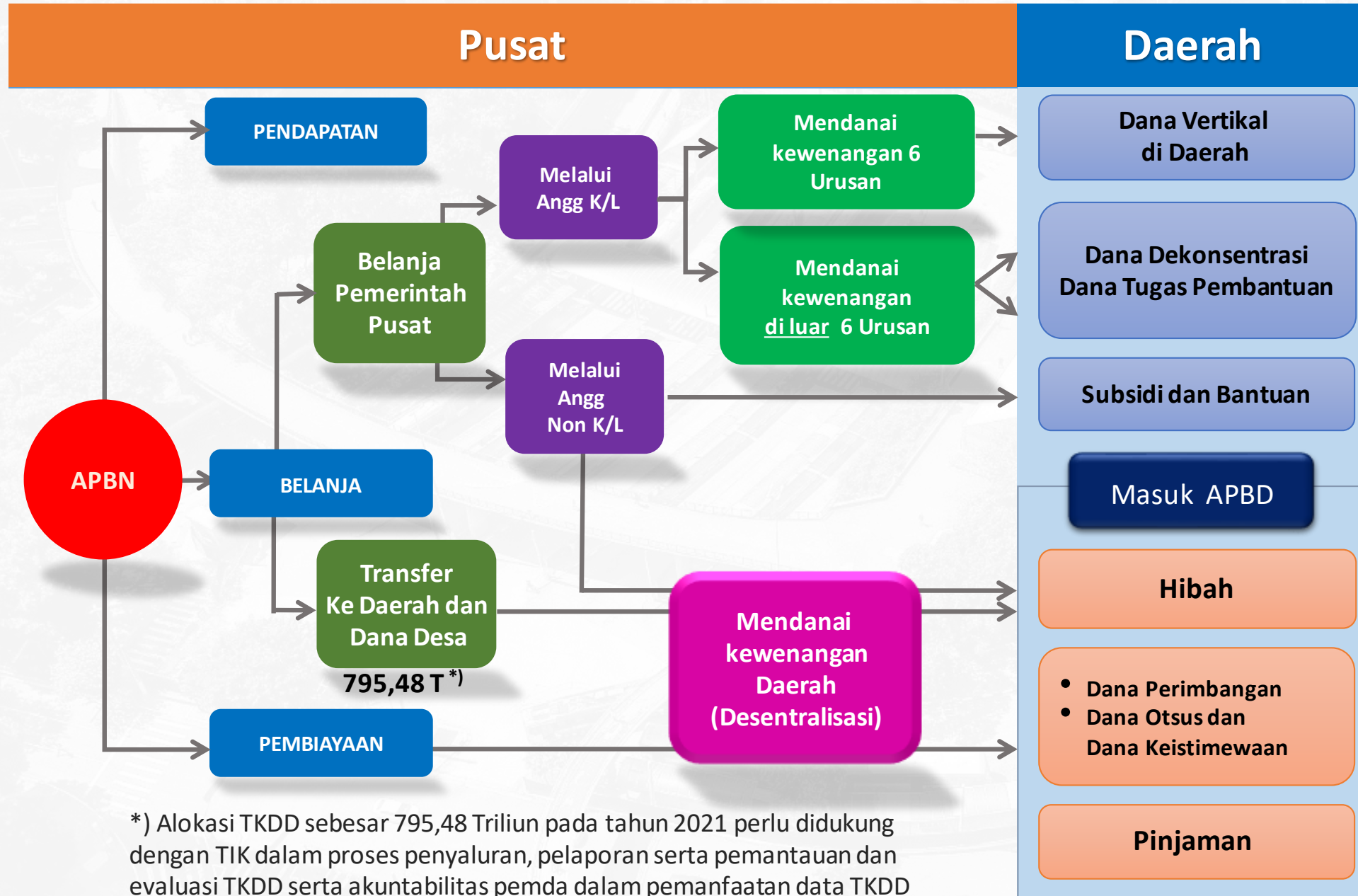
PENGELOLAAN FISKAL TERINTEGRASI

Optimalisasi TIK TKDD, Overview Pengelolaan Fiskal terintegrasi



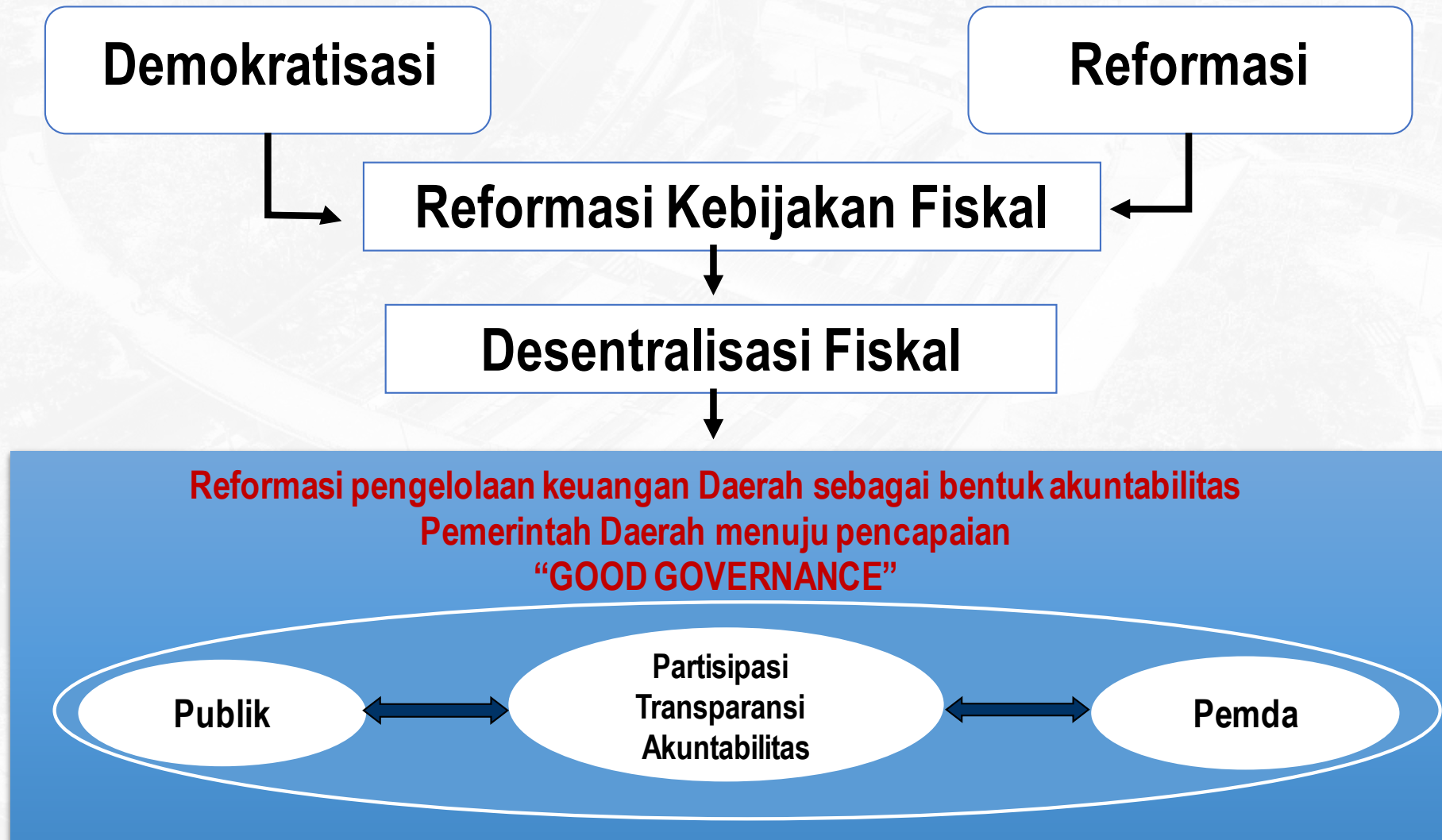


Alur Belanja APBN Ke Daerah





Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)





Pemanfaatan *tools* Teknologi Informasi untuk TKDD



SIKD adalah tools yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi kebijakan desentralisasi fiskal, untuk menjaga akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana TKDD yang disalurkan ke Pemerintah Daerah.

- Besaran dana APBN yang dialokasikan untuk belanja Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah khususnya TKDD semakin meningkat, sehingga dibutuhkan suatu tools untuk menjaga akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana TKDD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Daerah
- Dengan tujuan dan fungsi yang mendukung pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal tersebut, Pemerintah (Menkeu c.q DJPK) melakukan penyelenggaraan SIKD secara nasional sesuai dengan peraturan perundangan

01

One Source Data

Menjadi **One Source Data Keuangan Daerah di level nasional** yang dapat digunakan untuk penyajian informasi keuangan daerah, perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional, perumusan kebijakan keuangan daerah, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran Daerah.

02

Decision Making

Mendorong pengambilan keputusan yang efektif dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal tepat sasaran dengan penyajian informasi dan data penting terkait keuangan dan non keuangan daerah di dalam satu layar bagi pimpinan.

03

Data Dissemination

- Meningkatkan akuntabilitas pengiriman data dan informasi keuangan daerah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat;
- Menyajikan informasi pengelolaan keuangan daerah secara lebih transparan, akuntabel, relevan, tepat waktu, lengkap dan berkualitas



LANDASAN HUKUM SIKD

- UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- PP Nomor 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- PMK Nomor 74/2016 tentang Penyelenggaraan SIKD

DEFINISI SIKD

Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Pasal 1 PMK Nomor 74/PMK.07/2016)

Menteri Keuangan menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional

Sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) PP 56/2005

TUJUAN SIKD NASIONAL

Sebagai *One Source* data keuangan daerah di level nasional yang akan digunakan dalam rangka:

1. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional
2. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara nasional
3. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan pengendalian defisit anggaran
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran Daerah

AGEN SIKD

- Agen SIKD mengintegrasikan aplikasi SIKD Daerah dengan aplikasi SIKD Nasional.
- Agen SIKD yang telah dikembangkan:
 - a. Agen SINERGI untuk menghubungkan dan mengkomunikasikan data antara aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang beragam dengan aplikasi SIKD Nasional
 - b. Agen DAK Nonfisik untuk mengelola data pelaporan DAK non-fisik

Dukungan Pemda

- Menyediakan data IKD
Data disampaikan sesuai dengan standar dan ketentuan yang ditetapkan
- Menyampaikan Data Tepat Waktu
Penyampaian data sesuai batas waktu
- Menyiapkan Aturan SIKD di Daerah
Aturan mengenai Perencanaan, Pengembangan, dan Pemeliharaan SIKD Daerah serta Arsitektur SIKD Daerah
- Menyiapkan infrastruktur pendukung Aplikasi agen SIKD dan komunikasi data SIKD
- Menyiapkan SDM
Untuk penyelenggaraan SIKD di Daerah

TANTANGAN SINERGI DAN KOORDINASI DI LEVEL NASIONAL

1. **Penyelarasan SIKD sebagai reporting platform secara nasional dengan SIPD** yang sedang dikembangkan oleh Kemendagri untuk Pemda
2. **Penyelarasan RPP BAS untuk Daerah** yang saat ini sedang disusun Kemenkeu dengan aturan teknis operasional dari Kemendagri
3. **Simplifikasi Pelaporan** dengan penyederhanaan pelaporan yang diminta oleh Kemenkeu ataupun K/L pusat lainnya kepada Pemda.



SATU DATA KEUANGAN DAERAH*)

DATA TRANSAKSI FRAMEWORK INTERKONEKSI SIKD NASIONAL – SIKD DAERAH

SIPD (PMDN70/2019)

SIMDA

SIPKD

SIMRAL

SIMAKDA

EFINANCE

LAINNYA

S
I
N
E
R
G
I

V
5

Penyediaan Data Transaksi (PMK 24/2020):

1. Data APBD rinci

2. Data Jurnal Transaksi:

- Data Saldo Awal Akun
- Data Posisi Kas
- Data Realisasi Transaksi per Akun
- Data Transaksi Pendapatan dan Belanja
- Data per Segmen BAS
- Data Transaksi Non Tunai (TNT)
- Data Buku Besar (per Nomor Bukti)
- Data Penyesuaian/Koreksi dan Penutup

3. Data DTH/RTH

- Data Detail Belanja per SP2D + NTPN
- Data Potongan



Representasi Visual

Dashboard/
Analytical

Spending
Review

Policy
Brief

Situs
Web

Kompilasi dan Konsolidasi Data Nasional
(iKONSOL SIKD)

Layanan Data

Master Data Management

Data Quality Profiling

Data Interchange

CORE SIKD

Simplifikasi Pelaporan Pemda Saat Ini

APBD

DTH/RTH

LKPD

KAS

PNSD

Pengembangan Data Transaksi

Data APBD

Data Jurnal Transaksi

Data DTH/RTH

Bagan Akun Standar SIKD

Akun

Satker

Program

Output

Sumber
Dana

Lokasi

SINERGI VERSI 5 (Teknologi Komunikasi Data Transaksi)

PRESIDEN & MENTERI

CORE TAX SYSTEM

GFS - SIKRI

STRANAS & JAGA KPK

SIRUP LKPP

Pemeriksa (BPK, BPKP, APIP)

Satu Data - SPBE

Kementerian / Lembaga

Perbankan

Informasi Publik

*) Sebagai bagian perwujudan Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019) dengan Kemenkeu sebagai Pembina Data Keuangan Negara



Alur Data dan Informasi

PEMERINTAH DAERAH

APBD

- Murni
- Perubahan

REALISASI APBD

- Bulanan, Semesteran, Tahunan

Laporan LKPD

- Neraca, LO, LAK, LPE, LPSAL, CaLK

DTH/RTH

- Data Pajak dan Potongan Belanja
- Data Rekanan/Pihak ke-3

Gaji PNSD

- Data per Pegawai
- Rekap Gaji Pegawai
- Tunjangan Tambahan

SIMTRAD4

- Alokasi TKDD
- Realisasi TKDD

SINERGI



DJPK

CORE SIKD



sikd.djpk.kemenkeu.go.id

PELAPORAN DJPK



- DAK non Fisik
- DBH CHT, DAU
- DID

PENGUNAAN DATA

- Oleh Eksekutif - DASHBOARD



- ✓ APBD level 3
- ✓ Realisasi APBD level 3
 - Bulanan
 - Tahunan
- ✓ Alokasi dan Realisasi TKDD
- ✓ Posisi Kas
- ✓ Simpanan Pemda

- Oleh Publik - WEBSITE DJPK



- ✓ APBD level 3
- ✓ Realisasi APBD Tahunan
- ✓ Neraca
- ✓ Alokasi TKDD Nasional, per provinsi
- ✓ Realisasi TKDD Nasional, per provinsi

PEMANFAATAN DATA & INFORMASI



Pemanfaatan One Source Data Keuangan Pemda di Level Nasional dapat dimanfaatkan para stakeholder dalam formulasi kebijakan, kajian, maupun sebagai bentuk penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah



Informasi Eksekutif

Menyediakan data dan informasi terkait APBD dan TKDD untuk eksekutif sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan

Internal Kemenkeu

Data formulasi kebijakan maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit eselon I Kemenkeu

Contoh: Menetapkan kebijakan pajak atas belanja pemda, Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah

DJPK

Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional, menyajikan Informasi keuangan daerah secara nasional, merumuskan kebijakan keuangan daerah, melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi, Dekon TP, pinjaman, dan defisit anggaran

Contoh: Merumuskan kebijakan dan alokasi TKDD

Kementerian/Lembaga

Menyediakan data untuk formulasi kebijakan maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L

Contoh: Bank Indonesia, kemendikbud, Kemenkes, Kemenkoper, Kemendagri, Kemenpan, PT. Taspen, Bappenas, BPS, KSP, BKN



Pemerintah Daerah

Sebagai acuan pembuatan laporan pertanggungjawaban, data yang ditarik dari data transaksi dapat ditampilkan langsung

Akademisi

Menyediakan data untuk kajian terkait pengelolaan keuangan daerah demi perkembangan ilmu pengetahuan

Contoh: Kajian oleh akademisi dan kajian di berbagai universitas

Lembaga Donor

Menyediakan informasi kepada Lembaga Donor terkait pelaksanaan tupoksi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah

Contoh: Public Expenditure Review oleh World Bank, AIPEG, KOMPAK

Masyarakat Luas

Bentuk penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi terkait pengelolaan keuangan daerah

Contoh: data rincian TKDD, data dan informasi pada website (www.djpk.kemenkeu.go.id)



Mobile Dashboard SIKD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIBALANGAN KEUANGAN



Mobile Dashboard Aplikasi SIKD

versi 2.0.0

SIDE MENU

Berisi Menu Setting,
About, Disclaimer,
Contact dan FAQ

LOGOUT
Keluar dari aplikasi



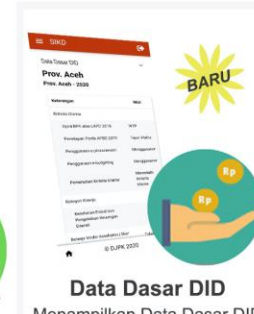
Utama

- Menampilkan peta
- Legenda warna menunjukkan capaian realisasi dalam persentase berdasarkan data alokasi



TKDD

Menampilkan grafik gauge yang menunjukkan persentase progress penyaluran TKDD agregat Nasional



Data Dasar DID

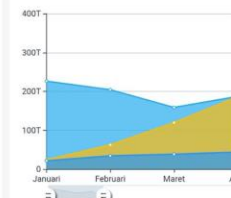
Menampilkan Data Dasar DID Pemda berdasarkan Kriteria Utama dan Penilaian Kinerja



Kas dan Belanja

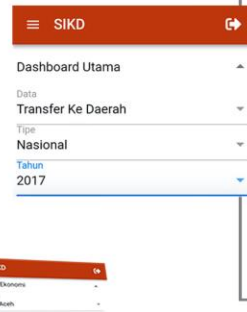
Menampilkan data Kas, Setara Kas, dan Realisasi Belanja Bulanan Pemda dalam bentuk grafik dan bentuk tabel

GRAFIK: Posisi Kas, Setara Kas, Belanja



Bulan	Kas	Setara kas	Belanja
Januari	226T	21T	23T
Februari	204T	34T	62T
Maret	158T	38T	119T
April	186T	43T	186T
Mei	227M	0	3T
Juni	0	0	0

FILTER



Data dapat disajikan sesuai tahun yang dipilih, mulai tingkat Nasional sampai ke tingkat Pemda

*untuk Menu Dana desa sampai ke tingkat desa



Sosial Ekonomi

Menampilkan data sosial ekonomi diantaranya Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan data sosial ekonomi lainnya



BARU

*Menu Postur APBD expand - collapse



Postur APBD

Menyampaikan informasi alokasi, realisasi, dan persentase dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan APBD



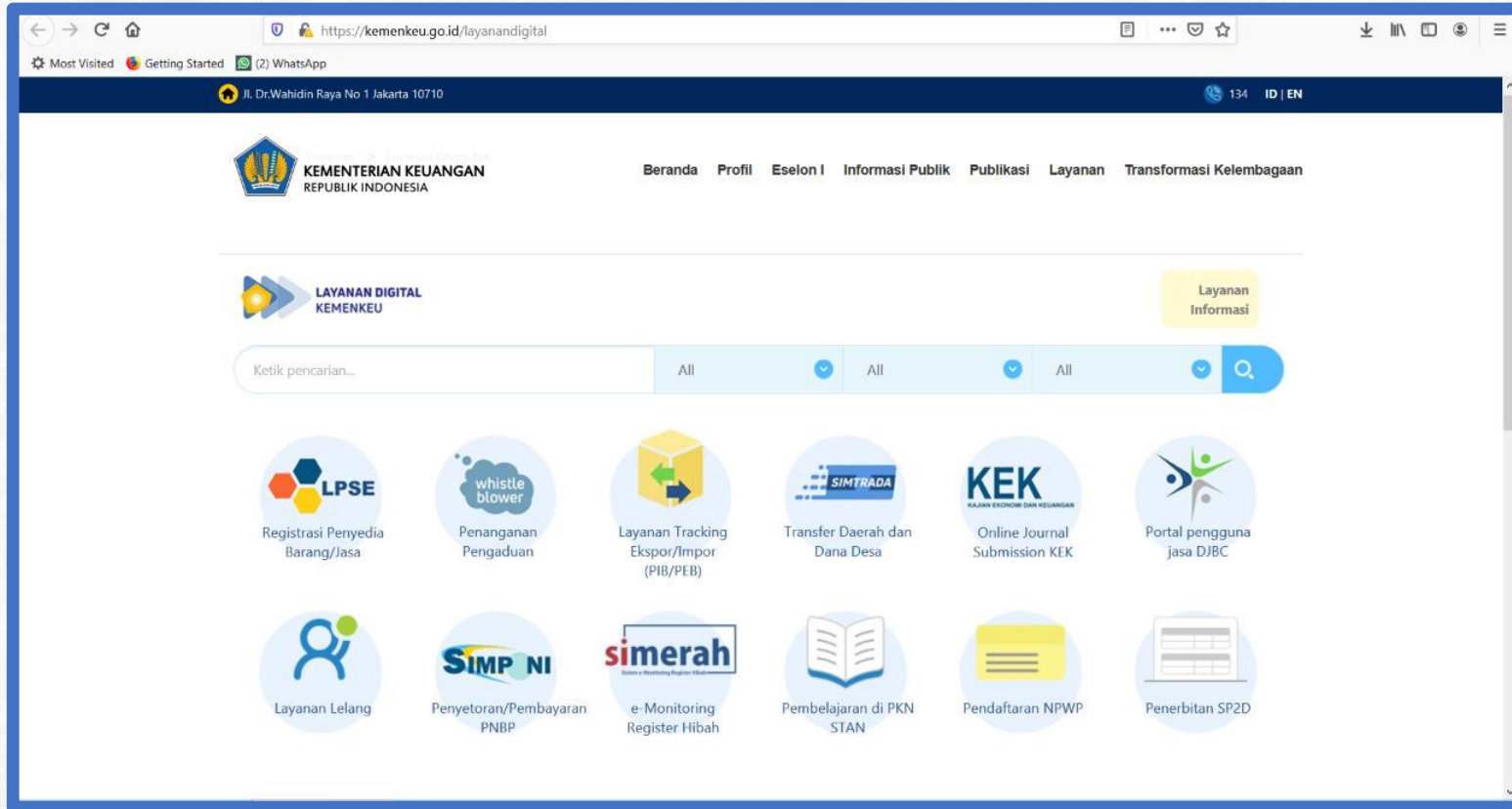
Postur Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Menyampaikan informasi alokasi, realisasi, dan persentase dari dana yang di transfer dari pemerintah pusat ke daerah



Informasi TKDD sebagai Layanan Digital Kemenkeu

Sistem Monitoring Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SIMTRADA) sebagai bentuk pelayanan digital Kemenkeu untuk eksternal, sehingga informasi dapat diperoleh tanpa harus datang secara fisik ke Kemenkeu



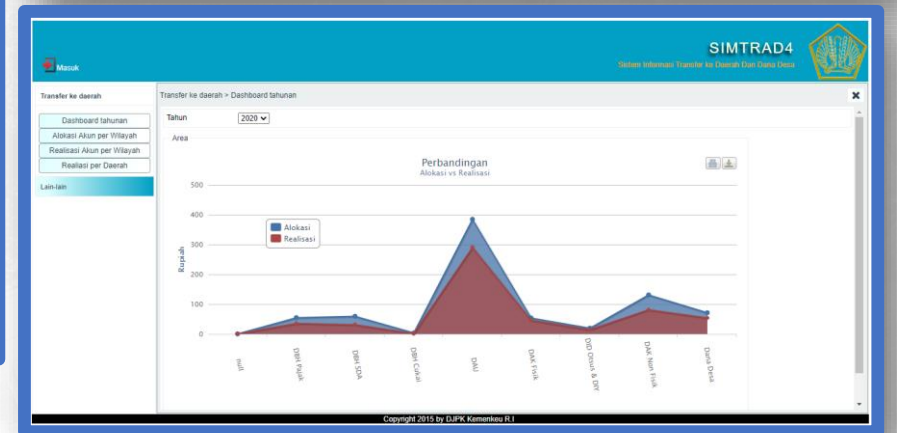
Transfer ke daerah

Alokasi dan Realisasi Detil

Filter

Uraian	Kotor	Potongan	Bersih	SP2D	Ditunda
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan	26,234,359,800	-	26,234,359,800	-	-
- DBH PPh, Triwulan ke-3 TA 2020 => 611111 DBH PPh Pasal 21	19,991,837,400	-	19,991,837,400	200191301015019_24-08-2020	-
Dana Desa					
- DBH PPh, Triwulan ke-3 TA 2020 => 611112 DBH PPh Pasal 25/29 OP	242,522,400	-	242,522,400	200191301015019_24-08-2020	-
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	17,730,287,550	-	17,730,287,550	-	-
- DBH PBB Non Migas Lainnya, Minggu ke 1-8 TA 2020 => 611211 DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi	371,217,200	-	371,217,200	200191301015007_24-08-2020	-
- DBH PBB Perhutanan, Minggu ke 1-8 TA 2020 => 611211 DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi	45,947,200	-	45,947,200	200191301015022_24-08-2020	-
- DBH PBB Perhutanan, Minggu ke 1-8 TA 2020 => 611211 DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi	2,111,495,600	-	2,111,495,600	200191301015021_24-08-2020	-
- DBH PBB Migas, Triwulan ke-3 TA 2020 => 611211 DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi	14,396,148,550	-	14,396,148,550	200191301015020_24-08-2020	-

Copyright 2015 by DJPK Kementerian RI



APLIKASI SIMTRAD4

(<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/simtrada/>)



Pengembangan dan Transformasi dengan Data Transaksi Pemda

DASAR HUKUM

- **Peraturan Menteri Keuangan nomor 24/PMK.07/2020** tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah
- **Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor PER-5/PK/2020** tentang Proses Bisnis Penyederhanaan Pelaporan Data Bulanan Pemerintah Daerah Melalui Data Transaksi Pemerintah Daerah

DEFINISI DATA TRANSAKSI

Data transaksi pemerintah daerah adalah data yang memuat **seluruh jenis transaksi** pemerintah daerah baik **keuangan maupun non keuangan** termasuk **rincian transaksi pendapatan dan belanja per bukti transaksi** dalam Rekening Kas Umum Daerah sehingga **paling kurang dapat menggambarkan posisi kas**, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan laporan keuangan secara lengkap dan andal

PENYEDIAAN DATA TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DATA SIKD

- (1) Data SIKD meliputi data keuangan dan data nonkeuangan.
- (2) Data SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data-data terkait pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal termasuk **Data Transaksi Pemerintah Daerah** yang dikelola dengan prinsip tata kelola data.

PROSES BISNIS PENYEDIAAN DATA TRANSAKSI PEMDA

Penyediaan data transaksi pemerintah daerah melalui SIKD diselenggarakan sesuai dengan proses bisnis penyediaan Data Transaksi Pemerintah Daerah yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan

PENYELENGGARAAN DATA TRANSAKSI PEMDA

Penyelenggaraan Data Transaksi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan **paling lambat tanggal 31 Desember 2021**



Optimalisasi TIK TKDD Tahun 2021

Tujuan

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi pada beberapa sektor guna mendukung dan meningkatkan kualitas serta *delivery* layanan kepada masyarakat



Optimalisasi TIK

Dana Insentif Daerah (DID)

penggunaannya pada tahun 2021 diarahkan untuk digitalisasi pendidikan dan kesehatan

Dana keistimewaan DIY

mendukung optimalisasi penyelenggaraan lima urusan keistimewaan di DI Yogyakarta dengan berbasis teknologi



Dana Transfer Khusus (DTK)

penyediaan sarana dan prasarana pendukung sistem informasi pendidikan dan kesehatan

Dana Otonomi Khusus

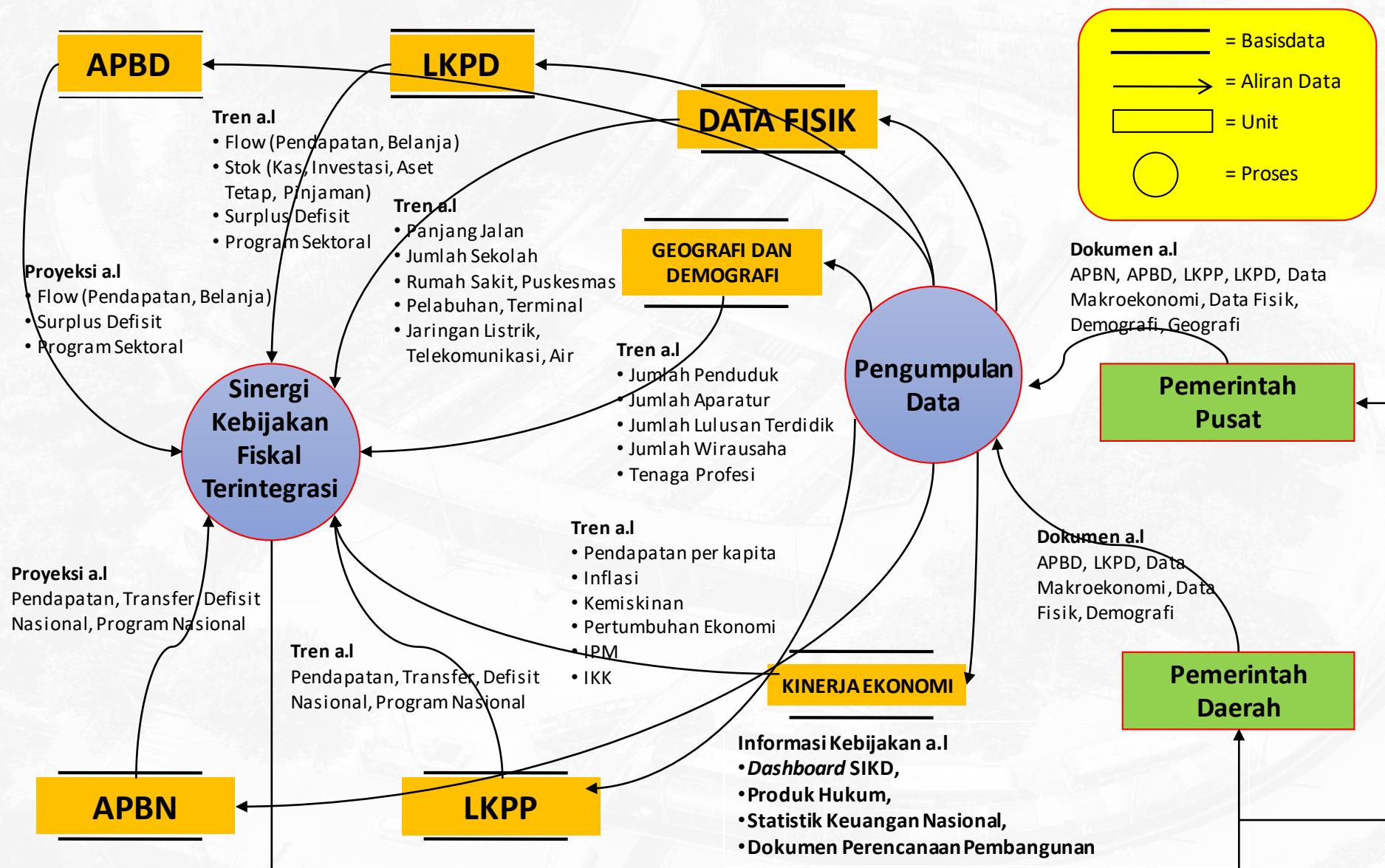
pembangunan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk perluasan akses dan peningkatan efektivitas layanan

Dana Desa

Program pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui pengembangan Ekosistem Digital di desa



Overview Aliran Informasi Fiskal Terintegrasi





Insentif Proses Interkoneksi Data Transaksi

Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan untuk memberikan **insentif/penghargaan** kepada daerah atas **kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja** di bidang **tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat**

Kriteria Utama

- Opini BPK atas LKPD (WTP)
- Penetapan Perda APBD tepat waktu
- Penggunaan e-Government (e-budgeting, dan e-procurement)

Kategori Kinerja

1. Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah

- a. Kemandirian Daerah
- b. Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah

c. **Sistem Informasi Keuangan Daerah (baru)**

2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan

- a. Angka Partisipasi Murni
- b. Peta Mutu Pendidikan

3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan

- a. Penanganan Stunting (Balita)
- b. Balita yang mendapatkan imunisasi lengkap
- c. Persalinan di fasilitas kesehatan

4. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur

- a. Akses sanitasi Layak
- b. Sumber air minum layak

5. Kesejahteraan Masyarakat

- a. Penurunan Penduduk Miskin
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- c. Penurunan Angka Pengangguran (baru)

6. Pelayanan Umum Pemerintahan

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- c. Penghargaan Pembangunan Daerah
- d. Inovasi Daerah

7. Peningkatan ekspor

8. Peningkatan Investasi

9. Pengelolaan Sampah

10. Pengendalian Inflasi Daerah (baru)

11. Indeks Pencegahan Korupsi (baru)



Batas Waktu Penyampaian dan Sanksi

No	Jenis IKD dan batas waktu penyampaian	Peringatan tertulis	Penjatuhan sanksi	Penetapan sanksi
1.	APBD 31 Januari Tahun Berjalan	15 Hari setelah batas waktu penyampaian	30 hari setelah peringatan tertulis	April Tahun Berjalan
2.	Perubahan APBD 30 hari setelah penetapan pada tahun berjalan			-
3.	Laporan Realisasi APBD Semester I 30 Juli Tahun Berjalan			Oktober Tahun Berjalan
4.	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 31 Agustus Tahun Berikutnya			November Tahun Berikutnya
5.	Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 31 Agustus Setelah Tahun Berjalan			-
6.	Laporan Realisasi Anggaran Bulanan Tanggal 20 bulan berikutnya			Bulan berikutnya setelah batas waktu penyampaian
7.	Posisi Kas Bulanan Tanggal 20 bulan berikutnya			
8.	Perkiraan Belanja Tanggal 20 bulan berikutnya			
9.	DTH/RTH Tanggal 20 Bulan berikutnya			



Sanksi Keterlambatan Penyampaian IKD

PMK 04 Tahun 2011 tentang Tata cara penyampaian IKD

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan IKD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya peringatan tertulis, dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan sebesar **25% (dua puluh lima persen)** dari jumlah DAU yang diberikan setiap bulannya pada tahun anggaran berjalan.

PMK 18 Tahun 2017 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU Ke Dalam Bentuk Nontunai

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan data bulanan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran DBH dan/atau DAU pada bulan berikutnya.

PMK 139 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

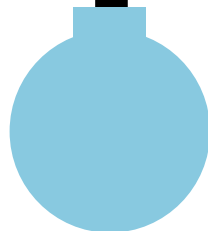
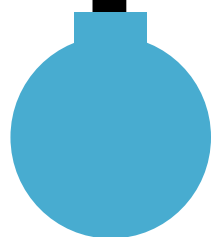
- Penyaluran DAU setiap bulan dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. DJPK menerima **laporan belanja pegawai**
- Penyaluran DAU bulan Januari **tidak lagi otomatis**, disalurkan setelah laporan belanja pegawai paling lambat 13 Desember 2019

PMK 85 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- DTH/RTH disampaikan secara bulanan **melalui SIKD**
- Disampaikan secara bulanan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya
- Dalam hal tidak disampaikan, **dapat dikenakan penundaan penyaluran DBH atau DAU** untuk periode bulan atau tahap berikutnya.



Terima Kasih



@DitjenPK



**direktorat jenderal
perimbangan keuangan**



ditjenpk



150420



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

